

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Untuk Melengkapi Serta Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

HARMIYON
NIM. 10675005070

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang kehidupan mereka dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa).

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat, hal itu bisa membuat BPD menjadi aktor dan pelopor demokrasi di desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang BPD yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota BPD kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat,

jika anggota BPD mempunyai kepentingan di luar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, BPD yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga desa sebagai objek persaingan elit partai politik di desa.

Sehingga dengan permasalahan yang kompleks diatas dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. BPD agar dapat benar-benar berperan sebagai legislator dan kontroling yang mampu menciptakan demokratisasi di desa.

Realitas yang ada di Pemerintahan Desa Tanjung Beringin, BPD mempunyai sumber daya manusia yang kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling tidak maksimal karena dari 5 orang anggota BPD hanya 2 orang tamatan SMA dan 3 orang tamatan sekolah dasar. Sehingga dengan rendahnya sumber daya manusia di lembaga BPD, di Desa Tanjung Beringin tidak bisa melaksanakan fungsi legislasi tersebut seperti yang diharapkan

Kemampuan menyusun perundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD sejajar dengan fungsi legislator dan kontroling, oleh karena itu perlu ada kemahiran membuat Peraturan Desa yang berguna mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman di pemerintahan desa.

BPD sebagai badan legislator desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkan bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap

aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD, oleh karena itu keikutsertaan berbagai rapat haruslah ditingkatkan. Untuk mengetahui absensi anggota BPD dan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Absensi Rapat Aparat Desa Tanjung Beringin

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak hadir
1	Mei	Anggota BPD	5	4	1
		Aparat Desa	10	4	6
		Masyarakat	30	15	15
2	Juni	Anggota BPD	5	3	2
		Aparat Desa	10	4	6
		Masyarakat	30	10	20
3	Juli	Anggota BPD	5	3	2
		Aparat Desa	10	5	5
		Masyarakat	30	16	14

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurangnya partisipasi anggota BPD serta masyarakat dalam menghadiri sertaip rapat yang dilaksanakan oleh desa, sehingga akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi

kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga Desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datang dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh desa-desa lain, begitupun dengan kondisi BPD di Desa tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang sering mengungkapkan permasalahan tentang kesejahteraan anggotanya dan belum menyangkut tentang permasalahan yang dialami warga sekitar. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes), karena sebelum Peraturan Desa (Perdes) ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :**“Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitan yang dilakukan terhadap sesuatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui kinerja BPD serta kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bagaimanapun juga diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan kata lain kegunaan teoritis berarti hasil penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berarti hasil penelitian memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna perbaikan kedepan.

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga BPD

- 1 Memberi dorongan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2 Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

b. Bagi Masyarakat Desa Tanjung Beringin

- 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai saluran aspirasinya pada tingkat Desa.
- 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengontrol kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mampu menjalankan fungsinya dengan benar.

3 Sebagai sarana motivasi bagi masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya terhadap pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin.

c. Bagi Pemerintahan Desa

- a) Memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa Tanjung Beringin tentang Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin.
- b) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan-peraturan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pemerintahan Desa.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Isi dari bab ini latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Isi dari bab ini tentang Landasan Teoretik, menguraikan tentang konsep-konsep dan teori-teori tentang Fungsi BPD dalam Legislasi Perdes, Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD, Perundang-Undangan (*Legal Drafting*) Perdes, Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Perdes dan Kerangka Berpikir.

BAB III : Metodologi Penelitian

Isi dari bab ini tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran, analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Isi dari bab ini adalah gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Isi dari bab ini adalah membahas hasil penelitian tentang fungsi legislasi badan permusyawaratan desa di desa tanjung beringin kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar.

BAB VI : Penutup

Isi dari bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Desa Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa, WNI yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala desa (Kades) pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dipimpinnya dengan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada

Bupati di Kabupaten yang bersangkutan atau Walikota di Kotamadya melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap memberikan kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekdes yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPD, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Yaitu usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan prasyarat luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pemerintah, potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yaitu jenis dan jumlah

usaha desa dan produksi keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris, kejasa industri dan meningkatnya volume pelayanan desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari PNS. Yaitu dalam ketentuan ini adalah PNS yang tersedia di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan seperti subak, sasi, mapalus, kajaroan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan masyarakat desa antara lain, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. Sebagai mitra pemerintah desa, salah satu tugas BPD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota BPD mencari dan mengumpulkan informasi yang di dapat langsung dari masyarakat, hasil informasi tersebut berupa aspirasi masyarakat dan yang berupa kritik, dan saran atas pemerintah desa yang terkait tentang ketentuan dan kesejahteraan masyarakat .

Anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus selalu proaktif dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibanya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya berdasarkan demokratisasi ekonomi.

Dalam prakteknya BPD juga mempunyai program kerja pemerintahan desa, program kerja tersebut antara lain:

- a. Perincian Kebijakan Pemerintah Desa.
- b. Memberikan saran / pertimbangan kepada desa dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih komprehensif diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana dijelaskan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Karakter Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Desa harus mampu menampung aspirasi atau kehendak dari masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) yang demikian tentunya lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Desa agar lebih berdaya dan lebih sejahtera.

B. Demokratisasi di Desa

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik, yang di jadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bisa berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil - wakil mereka (*representatif government*), yang di bentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah "Musyawarah untuk mufakat". Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses (demokrasi substansial). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan atau aspek formalitas demokrasi ketimbang proses pencapaian aspek substansi demokrasi. (Syahbudin, 2005: 34).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 8)

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa (Peraturan Desa) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (penjelasan PP No.72 tahun 2005: 54). Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi BPD dalam rangka demokratisasi desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Lurah Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau instansi yang berwenang.

Pengertian wujud demokrasi desa salah satunya adalah melalui pembentukan BPD semakin nyata dengan adanya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Pemerintah ini telah menempatkan BPD sebagai unsur demokratisasi di dalam pemerintahan desa.

C. Pemberdayaan BPD

Pemberdayaan sebagai proses menuju pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah sebuah obyek yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan (Carry, 2007:15).

Apabila obyek tersebut dalam kajian ini adalah BPD, maka kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari BPD itu sendiri. Oleh karena itu, BPD harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjuk bahwa sumber inisiatif bukan dari BPD. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan atau kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya.

Pemberdayaan secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan. Dalam kaitan ini, BPD yang sudah ada di desa bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan-kemajuan non materi. Dengan begitu pemberdayaan BPD bukan saja membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia), modal dan sarana, tapi juga membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan kearah mana perubahan akan dilakukan. BPD dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi obyek tapi menjadi subyek.

Mereka lah yang secara bersama-sama akan menentukan kearah mana mereka akan berkembang. Konsekuensi hal ini, jelas fasilitator pemberdayaan (pihak yang akan mengajak pada pemberdayaan) harus mampu mendekati obyek yang akan diberdayakan secara hati. Maksudnya, fasilitator adalah bagian lain yang berupaya menjadi jembatan bagi peningkatan, pengembangan, dan perubahan BPD kearah pelaksanaan fungsi BPD yang lebih baik.

Pemerintah juga melalui UU No. 32 tahun 2004 mengamanatkan agar camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan,

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. (Wasistiono, 2006:38).

Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yakni upaya yang dilakukan oleh pihak diluar BPD dan upaya yang dilakukan oleh BPD itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak diluar BPD adalah dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui bimbingan teknis ini diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan Peraturan Daerah di bidang pemerintahan desa dan juga teknis penyusunan Peraturan Desa. Khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BPD, bimbingan ini tertib keadministrasian BPD. Untuk menjamin tertib administrasi ini, disampaikan mengenai format-format mengenai buku data peraturan Peraturan Desa, buku data anggota BPD, buku data keputusan BPD, buku data kegiatan dan agenda BPD dan buku ekspedisi.

Khusus yang terkait dengan hambatan eksternal, khususnya belum adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai sejauh ini BPD menyikapinya dengan cara menjalankan fungsi yang disatu sisi tidak bertentangan dengan aturan baru, tetapi disisi lain juga mendasarkan kepada berbagai peraturan daerah yang telah ada berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BPD. Fungsi yang ditetapkan dijalankan secara konsisten adalah fungsi legislasi, yakni bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa; dan fungsi penyalur aspirasi, yakni menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

D. Kedudukan dan Fungsi BPD dalam Legislasi Peraturan Desa (Perdes)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa kedudukan BPD adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai mitra kerja, keberadaan BPD harus mampu menutup berbagai kelemahan dan kekurangan

Pemerintah Desa yang pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu kedudukan BPD sebagai mitra kerja kepala Desa orientasinya pada pemberdayaan masyarakat.

Fungsi BPD berdasarkan PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

- f. menyusun tata tertib BPD.

BPD juga mempunyai hak dan kewajiban, sesuai yang diuraikan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yaitu :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat
- c. mengajukan rancangan peraturan desa;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan pendapat;
- f. memilih dan dipilih; dan
- g. memperoleh tunjangan.

E. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Secara teoritis, pembuatan peraturan perundang-undangan belum bisa dilakukan tanpa ada struktur pembuatan hukum sebagai wadahnya. Struktur pembuatan hukum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Struktur ini tidak berdiri sendiri-sendiri, namun lebih merupakan bagian dari penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Dengan adanya pemisahan aktifitas ketatanegaraan menjadi tiga tersebut, maka pembuatan hukum akan berjalan melalui proses yang eksklusif.

Ketertiban dan peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai dari sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam

pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala desa sebagai pelaksana.

Salah satu fungsi yang dimiliki BPD adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang telah direncanakan atau diprogramkan sebelumnya. Karena BPD berfungsi sebagai pengawas maka anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi pelaksana dari berbagai kegiatan pembangunan.

Setiap kali Desa mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten, BPD selalu ikut dalam merencanakan dan menentukan berapa besar dana yang digunakan untuk kesejahteraan perangkat Desa, untuk kesejahteraan anggota BPD dan berapa besar dana yang digunakan untuk pembangunan Desa.

F. Teknik Perundang-undangan (*Legal Drafting*) Peraturan Desa.

Legal drafting adalah kata lain dalam bahasa Inggris yang artinya pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan ini sebagai aturan hukum hasil proses pengambilan keputusan hukum berisi materi muatan dan bersifat pengaturan (*regelling*). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian Peraturan Perundang-undangan, dan pengertian Keputusan sebagaimana dikemukakan di atas barang tentu tidak membatasi terhadap pengertian yang diberikan oleh Para Pakar atau Sarjana Hukum. Namun dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atau dalam penyelenggaraan hukum dan bahkan dalam penegakan hukum, maka pengertian secara yuridis tersebut yang semestinya dipegang atau digunakan.

UU No. 10 Tahun 2004 secara keseluruhan, maupun khususnya yang berkenaan dengan teknik penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan ketentuan yang mengatur cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan. Ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (3), dan Pasal 54.

Nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan, terakumulasi dalam kaidah moral yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum positif. Lili Rasjidi dalam hal ini menyatakan bahwa hukum positif ini harus bersesuaian dengan norma-norma yang lebih tinggi. Pembuat Peraturan Perundang-undangan wajib

mengikutinya sebagai pedoman pada pekerjaan membuat Undang-Undang. Misalnya, pembuat Undang-Undang tidak boleh mengumumkan Undang-Undang sebagai norma hukum.

Dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan setidaknya 5 (lima) asas dibawah ini perlu diketahui oleh perancang dan pelaksana peraturan yaitu:

- a. *Asas lex superiori derogat lex atheriori* (peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi pula kedudukannya);
- b. *Asas lex superiori derogat lex inferiori* (peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah);
- c. *Asas lex posteriori derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama);
- d. *Asas lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum);
- e. *Asas egaliator* (non diskriminatif dalam perumusan norma).

Pasal 5 UU No.10 Tahun 2004 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan; yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; yaitu bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas yang di atur dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- a. Pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat

didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Bhineka tunggal ika yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pelaksanaan legislasi dalam arti pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mewadai semua asas-asas baik pembentukan maupun materi yang dimuatnya memang bukan hal yang mudah. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Selain harus memenuhi asas-asas diatas, pelaksanaan legislasi juga harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Produk hukum daerah terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Walikota
- c. Keputusan Walikota
- d. Instruksi Walikota

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sesuai kondisi alam, penduduk, dan adat istiadat) Lampiran mengenai

ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU No. 10 Tahun 2004, dengan demikian Lampiran tersebut bersifat mengikat dan merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Rancangan Keputusan.

Inisiatif penyusunan sebuah Peraturan Desa hanya dapat dilakukan apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memang benar-benar memerlukan sebuah Peraturan Desa baru. Peraturan Desa baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, baik itu lembaga/instansi pemerintah, BPD, lembaga pendidikan, organisasi non pemerintah, maupun kelompok masyarakat itu sendiri.

Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni :

1. Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datang dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datang dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan

Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah idea tau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui siding pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa.

Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat Desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

2. Tahap Sosio-Politis

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk menampung

aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Peraturan Desa dapat diterima.

Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan Tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum.

Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

3. Tahap Yuridis.

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan landasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- a. Landasan Filosofis, bahwa hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat.
- b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan atau sederet Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Produk-produk hukum yang dibuat harus dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Mengenai hal ini ada tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui pengakuan masyarakat tentang hukum yang dibuat, yaitu :

- a. Peraturan Perundang-undangan, disosialisasikan mulai saat perancangan dan sosialisasi ini berlangsung terus menerus sepanjang proses perancangan sampai dengan awal pelaksanaannya.
- b. Kesadaran hukum, kesadaran sosial, dan adat istiadat di dalam masyarakat sudah dijadikan jiwa dalam peraturan yang dibuat. Perilaku sosial dan adat istiadat dimaksud harus pro pada pembentukan masyarakat daerah yang bersangkutan ke arah masyarakat Indonesia yang modern, agamis dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula keadaannya di Daerah Papua, Bali, dan daerah lain yang spesifik, kesadaran religi dan adat istiadat masyarakatnya harus menjadi nafas dari norma yang disusun dalam peraturan daerahnya. Bahkan kekhususan otonomi daerah di Papua dan Bali dapat memungkinkan *Hukum Kanakonik* (Hukum Gereja) dan *Hukum Weda* (Hukum Hindu) menjadi sumber hukum pula.
- c. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus sebanyak-banyaknya mengatur keinginan sebanyak-banyaknya penduduk dan

mengakomodasi sebanyak-banyaknya keinginan semua golongan masyarakat.

Tolok ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (*acceptable*), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

G. Variabel Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian adalah Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Legislasi :
 - a. Merumuskan Peraturan Desa
 - b. Menetapkan Peraturan Desa
 - c. Membuat Peraturan bersama Pemerintah Desa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyeksubyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulkannya. (Sugiono, 2005 : 90)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila polulasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif mewakili. (Sugiyono, 2005 : 91)

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh dari anggota Badan permusyaratan Desa (BPD) dan Seluruh aparat Desa serta pemuka masyarakat Desa tanjung beringin ke camatan kampar kiri hulu kabupaten kampar. Untuk lebih jelas populasi dan sample dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sample	Persentase(%)
1	BPD	5	5	100 %
2	Masyarakat	617	41	15 %
	Jumlah	617	46	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2010

C. Jenis dan sumber data

1. Data primer : yaitu data yang diperoleh langsung responden melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara.
2. Data skunder : yaitu data yang di peroleh studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang mengenai demografi desa tanjug beringin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk megetahui secara umum tentang keadan fungsi Badan permusyawaratan Desa di Desa tanjung beringin kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar.

b. Interview atau Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang dijadikan sample dalam penelitian ini yang terdiri dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Desa dan pemuka masyarakat Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 41 orang.

c. Kuesioner

Kuesioner atau daftar pertanyaan adalah suatu metode yang digunakan dalam melengkapi yang diperoleh melalui wawancara, yaitu dengan cara mengumpulkan data menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa dengan alternatif yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Analisa Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data tersebut menurut sifat dan jenis yang akan disajikan dalam tabel. Kemudian menganalisisnya dilakukan pembahasan secara deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang akan diteliti dengan disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Sejarah Desa

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Desa Tanjung Beringin juga merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Batu Sanggan. Desa Tanjung Beringin dimekarkan dari Desa Batu Sanggan pada tahun 1999 oleh bupati Kampar pada waktu itu yaitu Bapak H. Beng Sabli. Semenjak dimekarkan sampai sekarang Desa Tanjung Beringin mulai berbenah diri dalam berbagai bidang pembangunan terutama sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat.

B. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Beringin terletak di sebelah utara ibukota Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan luas wilayah 710 ha. Adapun jarak dari desa Tanjung Beringin dengan ibukota Kecamatan yaitu 18 KM. sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten 125 KM dan jarak ke ibukota Provinsi 132 KM.

Luas wilayah Desa Tanjung Beringin 710 ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah Desa Tanjung Beringin yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gajah Bertalut
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Belit
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Sanggan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Lamo

Dengan demikian, desa Tanjung Beringin luas wilayahnya sejak mulai ditempati hingga sekarang tidak pernah berkurang dan bertambah, dari perbatasan-perbatasan dengan desa-desa tetangga lainnya samapai tanah pertanian, perkebunan hingga dengan tanah pekarangan rumah penduduk. Sedangkan keadaan tanahnya yaitu perbukitan.

C. Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Jumlah penduduk Desa Tanjung Beringin pada tahun 2010 adalah sebanyak 710 jiwa yang terdiri dari 315 jiwa laki-laki dan 395 jiwa perempuan. Untu lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Tanjung Beringin Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	301	48,78%
2	Perempuan	316	51,22%

Jumlah	617	100%
---------------	------------	-------------

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak jumlahnya yaitu 316 jiwa (51,22%) dari pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 301 jiwa (48,78%).

D. Kondisi Pendidikan Penduduk

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah.

Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga negara (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945)

Untuk lebih jelas tingkat pendidikan penduduk desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Hulu Tengah Kabupaten Kampar , dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2:Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Beringin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	102	56,67%
2	SLTP	41	22,78%
3	SLTA	25	13,89%
4	Ponpes	3	1,67%
5	Perguruan Tinggi	9	5,00%
Jumlah		180	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah di Desa Tanjung Beringin mayoritas semuanya sekolah. Hal ini terlihat sekarang bahwa 102 orang atau 56,67% usia sekolah meneyam pendidikan SD, kemudian 41orang atau sekitar 22,78% penduduk usia sekolah meneyam pendidikan SLTP. Selanjutnya 25 atau 13,89% orang penduduk usia sekolah telah meneyam pendidikan setingkat SLTA dan 3 atau 1,67% orang usia sekolah telah berpendidikan Pondok Pesantren dan 9 atau 5,00% orang penduduk usia sekolah sedang menempuh pendidikan diberbagai perguruan tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Tanjung Beringin. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. pada umumnya gedung-gedung sekolah di Desa Tanjung Beringin belum memadai dan dalam kondisi kurang bagus.

Keadaan yang telah disebutkan diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Beringin

No	Jenis Sarana	Jumlah	Persentase
1	Gedung SD	1	50%
2	Gedung MDA	1	50%
Jumlah		2	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu berjumlah 2 buah saja dimana Gedung SD sebanyak 1 buah atau 50% dan Gedung MDA sebanyak 1 buah 50%. Dengan adanya sarana pendidikan yang belum memadai tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan sebagaimana program dari pemerintah yaitu pendidikan wajib 9 tahun.

E. Mata Pencanharian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Tanjung Beringin mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani karet. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Beringin

Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4:Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Tanjung Beringin

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	6	1,23%
2	Pegawai Swasta	3	0,62%
3	Pedagang	10	2,07%
4	Pertukangan	10	2,07%
5	Petani	456	94,02%
	Jumlah	485	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Tanjung Beringin terdapat 456 orang (94,02%) bekerja sebagai petani, 6 orang (1,23%) bermata pencaharian sebagai PNS, 3 orang (0,62%) sebagai Pegawai Swasta. Kemudian sebanyak 10 orang (2,07) bermata pencaharian sebagai Pedagang serta 10 orang (2,07%) berprofesi sebagai tukang.

F. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar manusia, kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dijamin dalam dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari Pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi

antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah negara yaitu pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Agama juga merupakan hubungan antara makhluk dengan sang khaliq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syari'at agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sanksi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Tanjung Beringin, mayoritas penduduknya menganut agama islam.

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung sarana tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain tempat

ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan yang ada di Desa Tanjung Beringin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.5: Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Beringin
Kecamatan Kampar Kiri Hulu**

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	1	33,33%
2	Mushollah/surau	2	66,67%
3	Gereja	-	-
4	Wihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		3	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat hanya 1 buah mesjid (33,33%) dan 2 buah mushollah/Surau (66,67%) sebagai tempat ibadah umat islam. Sedangkan tempat ibadah pemeluk agama lain tidak ada di Desa Tanjung Beringin ini.

Sedangkan sarana kesehatan penduduk di Desa Tanjung beringin terdapat 1 buah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu dan 1 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

G. Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terbagi atas empat (4) Dusun dan enam belas (16) Rukun Tetangga (RT) serta delapan (8) Rukun Warga (RW). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6: Jumlah RT, RW dan Dusun di Desa Tanjung Beringin

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Tanjung Beringin	2	4
2	Dusun Koto Tengah	2	4
3	Dusun Telaga Indah	2	4
4	Dusun Bina Baru	2	4
Jumlah		8	16

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap dusun mempunyai 2 Rukun Warga (RW), kemudian dusun yang mempunyai jumlah Rukun Tetangga (RT) terdapat pula 4 buah setiap Dusunnya.

Saat ini Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Saib.M dan dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yaitu Bapak Sudirman. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu pula oleh aparat desa yaitu bebarapa orang Kepala Urusan (Kaur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7: Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Beringin

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Saib. M	Kepala Desa	SMA	Laki-laki
2	Sudirman	Sekretaris Desa	SMA	Laki-laki
3	Ajismanto	Kaur Pemerintahan	SLTP	Laki-laki
4	Saipul	Kaur Umum	SLTP	Laki-laki
5	Marjon	Kaur Keuangan	SLTP	Laki-laki
6	Sukurman	Kaur Pembangunan	SLTP	Laki-laki
Jumlah		-	-	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Beringin 2010

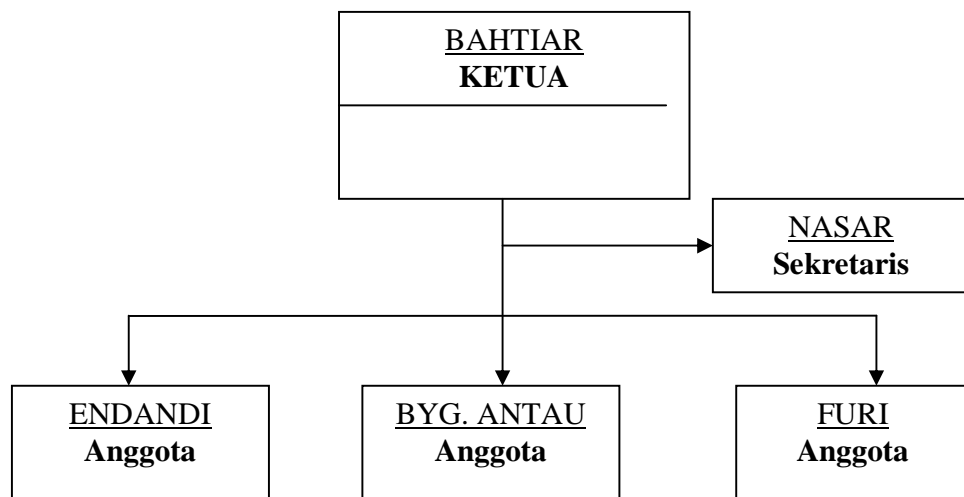
Dari tabel diatas dapat dilihat aparat pemerintahan Desa Tanjung Beringin berpendidikan sekolah menengah keatas, sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat serta dalam perencanaan pembangunan.

H. Struktur Organisasi BPD Desa Tanjung Beringin

Bagan merupakan sesuatu yang membantu dalam memberikan penggambaran dan perencanaan suatu organisasi hal ini tidak memecahkan masalah organisasi. Untuk menunjang tugas serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibuat bagan organisasi.

Untuk melihat struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 1 : Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Untuk menunjang keobjektifitasan dan akuratnya data dalam penelitian ini, maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota BPD dan masyarakat yang menyangkut tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan umur sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

1. Tingkat Pendidikan

Secara umum telah diketahui bahwa pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktifitas hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan yang tinggi karena sudah kodratnya manusia menginginkan kualitas terbaik dari setiap pelaksanaan kegiatan dan tugasnya.

Implikasinya sangat jelas, kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, sehingga tanpa pendidikan yang layak seorang individu akan tertinggal jauh. Demikian juga dengan anggota BPD desa Tanjung Beringin yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Di Desa tersebut pendidikan juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan memiliki peranan yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya pendidikan anggota BPD dan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Tingkat Pendidikan Responden dari BPD

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3	60%
2	SLTP	-	
3	SLTA	2	40%
4	Sarjana	-	
Jumlah		5	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari tamatan SD sebanyak 3 orang (60%), kemudian yang tamatan SLTA sebanyak 2 orang responden (40%). Sedangkan tamatan SLTP dan Sarjana tidak ada.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden dari masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden dari Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	24	52,17%
2	SLTP	14	30,43%
3	SLTA	7	15,21%
4	Sarjana	1	2,17%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari tamatan SD sebanyak 24 orang (52,17%), tamatan SLTP sebanyak 14 orang (30,43%) dan yang tamatan SLTA sebanyak 7 orang responden (15,21%). Sedangkan responden yang berpendidikan Sarjana hanya 1 orang saja (2,17%).

B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Fungsi legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999 Pasal 48 ayat (1) menyebutkan fungsi legislasi merupakan rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa atau BPD, sedangkan ayat (2) menyebutkan kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dengan demikian, fungsi BPD hampir sama dengan DPRD untuk tingkat Kabupaten dan Provinsi yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan terhadap peraturan desa yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan desa. Oleh karena BPD memiliki peranan yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan peraturan desa, maka anggota BPD harus mempelajari, memahami, menganalisa dan mempertimbangkan secara matang tentang peraturan desa yang akan dituju tersebut,

untuk itu setiap anggota BPD harus mengenyampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok dan pihak-pihak tertentu dalam persetujuan peraturan desa.

Menurut Arbi Sani dalm Rauf dan Zulfan (2004 : 35), bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau pembuat Undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakilrakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dalam pasal-pasal yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan, parlemen pula sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal Undang-undang yang sama.

1. Merumuskan Peraturan Desa

BPD memiliki wewenang membuat peraturan desa bersama kepala desa yang nantinya akan menghasilkan peraturan desa. Sehubungan dengan hal itu untuk mengetahui sejauh mana anggota BPD di Desa Tanjung Beringin bisa merumuskan peraturan desa dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Tanggapan Responden Peran BPD Dalam Merumuskan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	4	8,69%
	Cukup Baik	1	2,17%
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	8	17,39%
	Cukup Baik	20	43,47%
	Kurang Baik	13	28,26%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden BPD yang memberikan jawaban baik dalam merumuskan peraturan desa sebanyak 4 orang (8,69%) dan yang memberikan jawaban cukup baik hanya 1 orang saja (2,17%). Sedangkan yang menjawab kurang baik tidak ada. Kemudian dari responden masyarakat yang memberikan jawaban baik dalam merumuskan peraturan desa sebanyak 8 orang (17,39%) dan yang menjawab cukup baik sebanyak 20 orang (43,47%) serta yang menjawab kurang baik sebanyak 13 orang (28,26%) saja.

Dari jawaban responden diatas tergambar bahwa anggota BPD di Desa Tanjung Beringin mayoritas memberikan jawaban baik dalam merumuskan peraturan desa dan hanya 1 orang saja yang cukup baik. Namun berbanding terbalik dengan jawaban dari responden masyarakat, dimana mayoritas mereka menjawab cukup baik dan kurang baik.

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang keikutsertaan BPD merumuskan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	10	21,17%
	Cukup Baik	20	43,47%
	Kurang Baik	11	23,91%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden dari BPD memberikan jawaban mengenai keikutsertaan dalam merumuskan peraturan desa pada kategori jawaban baik sebanyak 5 orang (10,86%), sedangkan jawaban lain tidak ada yang menjawab.

Kemudian dari jawaban responden masyarakat memberikan jawaban baik sebanyak 10 orang (21,17%), jawaban cukup baik sebanyak 20 orang (43,47%) dan yang memberikan tanggapan kurang baik sebanyak 11 orang atau (23,91%).

Kemudian berdasarkan observasi penulis dilapangan terlihat bahwa anggota BPD pernah seluruhnya ikutserta dalam merumuskan peraturan desa.

Tabel V.5:Tanggapan Responden Mengenai Memperhatikan Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	3	6,52%
	Cukup Baik	2	4,34%
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	10	21,73%
	Cukup Baik	15	32,61%
	Kurang Baik	16	34,78%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden dari BPD memberikan jawaban baik sebanyak 3 orang (6,52%) dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 2 orang (4,34%) sedangkan kategori jawaban kurang baik, tidak ada yang menjawab. Kemudian dari responden masyarakat memberikan jawaban baik sebanyak 10 orang (21,73%)) dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 15 orang (32,61%) serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 16 orang (34,78%).

Berdasarkan tanggapan responden diatas mengenai indikator merumuskan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat direkapitulasi seluruh jawaban responden sebagai berikut :

Tabel V.6:Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai merumuskan Peraturan Desa

No	Indikator Pertanyaan	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Total
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1	Peran BPD merumuskan peraturan desa	12	26,08	21	45,65	13	28,26	46
2	Ikut serta dalam merumuskan peraturan desa	15	32,60	20	43,47	11	23,91	46
3	Memperhatikan aspirasi masyarakat dalam merumuskan peraturan desa	13	28,26	17	36,95	16	34,78	46
Jumlah		40	28,98	58	42,02	40	28,98	138

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari rekapitulasi tabel diatas terlihat bahwa 40 responden menjawab pada kategori jawaban baik atau (28,98%), sedangkan responden yang menjawab pada kategori jawaban cukup baik sebanyak 58 orang (42,02%). Sedangkan responden yang menjawab pada kategori jawaban kurang baik sebanyak 40 orang juga (28,98%).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa masih minimnya masyarakat yang tahu akan perumusan peraturan desa, hal ini terjadi karena masih minimnya tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri.

2. Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan peraturan desa merupakan pekerjaan yang sangat penting dilakukan oleh BPD bersama kepala desa. Peraturan desa yang akan ditetapkan haruslah membawa kebaikan serta perubahan yang mendasark bagi kelangsungan

kehidupan masyarakat. Peraturan yang akan ditetapkan hendaknya tidak bertentangan dengan peraturan daerah serta kepentingan masyarakat. Anggota BPD diamanatkan bisa menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

Tabel V.7 : Tanggapan Resonden Mengenai Peran BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	3	6,52%
	Cukup Baik	1	2,17%
	Kurang Baik	1	2,17%
Masyarakat	Baik	14	30,43%
	Cukup Baik	15	32,60%
	Kurang Baik	12	26,08%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden BPD menjawab baik sebanyak 3 orang (6,52) dan yang menjawab cukup baik sebanyak 1 orang (2,17%) serta yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang juga (2,17%). Kemudian responden dari masyarakat yang menjawab baik sebanyak 14 orang (30,43) dan yang menjawab cukup baik sebanyak 15 orang (32,60%) serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 12 orang (26,08%).

Dari keterangan diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa BPD tahu cara menetapkan peraturan desa. Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi penulis dan jawaban responden baik dari kalangan masyarakat maupun dari anggota BPD Desa Tanjung Beringin itu sendiri.

Tabel V.8 :Tanggapan Responden Mengenai keikutsertaan BPD dalam Rapat Menetapkan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	20	43,47%
	Cukup Baik	10	21,73%
	Kurang Baik	11	23,91%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden BPD seluruhnya memberikan jawaban baik mengenai keikutsertaannya dalam rapat menetapkan peraturan desa yaitu sebanyak 5 orang (10,86%). Sedangkan responden dari masyarakat menjawab baik sebanyak 20 orang (43,47%) dan yang menjawab cukup baik sebanyak 10 orang (21,73%) serta yang menjawab kurang baik sebanyak 11 orang (23,91%).

Tabel V.9 :Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	9	19,56%
	Cukup Baik	21	45,65%
	Kurang Baik	11	23,91%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden dari BPD seluruhnya menjawab baik dalam menetapkan peraturan desa. Sedangkan dari responden masyarakat memberikan jawaban bervariasi dimana yang menjawab baik sebanyak 9 orang

(19,56%) dan yang menjawab cukup baik sebanyak 21 orang (45,65%) serta yang menjawab kurang baik sebanyak 11 orang (23,91%).

TabelV.10 :Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Menetapkan Peraturan Desa

No	Indikator Pertanyaan	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Total
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1	Peran BPD Menetapkan Peraturan Desa	17	36,95	16	34,78	13	28,26	46
2	Keikutsertaan BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa	25	54,34	10	21,73	11	23,91	46
3	Kemampuan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa	14	30,43	21	45,65	11	23,91	46
Jumlah		56	40,57	47	34,05	35	25,36	138

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai menetapkan peraturan desa diatas 56 orang responden memberikan jawaban pada kategori baik (40,57%) dan 47 orang memberikan jawaban pada kategori jawaban cukup baik (34,05%) serta 35 orang responden memberikan jawaban kurang baik (25,36%).

Kemudian dari keterangan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD beserta masyarakat telah tahu mengenai penetapan peraturan desa.

3. Membuat Peraturan Bersama Kepala Desa

Fungsi legislasi BPD juga membuat peraturan Desa bersama kepala desa. Peraturan desa yang dibuat BPD bersama Kepala Desa hendaknya dapat memberikan kemajuan kepada desa.sehingga fungsi legislasi dari BPD itu sendiri dapat berjalan

sesuai amanat undang-undang. Untuk mengetahui apakah BPD di Desa Tanjung Beringin sudah membuat peraturan desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Mengenai Kerjasama BPD Dengan Kepala Desa dalam Membuat Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	15	32,60%
	Kurang Baik	26	56,52%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden dari BPD memberikan jawaban baik sebanyak 5 orang (10,86%) atau mayoritas. Sedangkan responden masyarakat memberikan jawaban baik sebanyak 5 orang (10,85%), cukup baik sebanyak 15 orang (32,60%) dan kurang baik sebanyak 26 orang (56,52%).

Tabel V.12 :Jawaban Responden Mengenai Pemahaman BPD Dan Kepala Desa Tentang Cara Pembuatan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	3	6,52%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	2	4,34%
Masyarakat	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	15	32,60%
	Kurang Baik	21	45,65%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas responden dari anggota BPD memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang (6,52%), sedangkan cukup baik tidak ada dan kurang baik sebanyak 2 orang (4,34%). Kemudian responden dari masyarakat memberikan jawaban baik

sebanyak 5 orang (10,86%) dan cukup baik sebanyak 15 orang (32,60%) dan kurang baik sebanyak 21 orang (45,65%).

Tabel V.13 :Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi BPD Kepada Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
BPD	Baik	5	10,86%
	Cukup Baik	-	-
	Kurang Baik	-	-
Masyarakat	Baik	18	39,13%
	Cukup Baik	15	32,60%
	Kurang Baik	8	17,39%
Jumlah		46	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel diatas responden dari BPD memberikan jawaban baik sebanyak 5 orang (10,86%) ataupun secara keseluruhan. Sedangkan responden dari masyarakat memberikan jawaban baik sebanyak 18 orang (39,13%) dan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 15 orang (32,60%) serta yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 8 orang saja (17,39%).

Tabel V.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Membuat Peraturan Desa

No	Indikator Pertanyaan	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Total
		Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1	Kerjasama BPD dengan Kepala Desa dalam membuat peraturan desa	10	21,73	15	32,60	26	56,52	46
2	Pemahaman BPD dan tentang Cara pembuatan peraturan desa	8	17,39	15	32,60	23	50	
3	Sosialisasi BPD kepada masyarakat	23	50	15	32,60	8	17,39	46

	sebelum pembuatan peraturan desa bersama kepala desa							
Jumlah		41	29,71	45	32,60	57	41,30	138

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa responden memberikan jawaban pada kategori jawaban baik sebanyak 41 orang responden (29,71%) dan yang memberikan jawaban pada kategori jawaban cukup baik sebanyak 45 orang (32,60%) serta yang memberikan jawaban pada kategori jawaban kurang baik sebanyak 57 orang (41,30%).

Kemudian dari rekapitulasi pada indikator fungsi legislasi BPD pada indikator membuat peraturan Desa bersama kepala desa belum berjalan secara optimal. Selanjutnya BPD juga belum menjalankan fungsinya sebagai legislator di desa secara menyeluruh, dan juga masyarakat belum mengerti dengan fungsi BPD itu sendiri.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspek tidak akan dapat berjalan maksimal, bilaman wakil masyarakat yang berada di BPD sebagai orang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa bersama kepala desa, bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap keondisi masyarakatnya dan pemerintahan desa, maka yang terjadi ialah kefakuman. Padahal dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menjelaskan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah responden yang tidak pro aktif, baik dalam penetapan

peraturan desa, perumusan peraturan desa, rapat dan sebagainya sehingga kinerja BPD tidak berjalan optimal sesuai yang diamanatkan Undang-undang dan masyarakat.

Tabel V.15 :Rekapitulasi Seluruh Jawaban Responden Mengenai Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

No	Indikator Penelitian	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Merumuskan Peraturan Desa	40 (28,98%)	58 (42,02%)	40 (28,98%)
2	Menetapkan Peraturan Desa	56 (40,57%)	47 (34 ,05%)	35 (25,36)
3	Membuat Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	41 (29,71%)	45 (32,60%)	57 (41,30%)
Jumlah		138 (30,91%)	150 (36,23%)	132 (31,88%)

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Dari rekapitulasi hasil seluruh jawaban responden mengenai Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat bahwa :

1. Merumuskan Peraturan Desa terlihat bahwa tidak berjalan dengan baik yaitu berada pada kategori cukup baik dengan jawaban responden terbanyak yaitu berjumlah 58 orang (42,02%). Hal ini ditandai pula dengan hasil observasi penulis dilapangan yaitu terlihat bahwa anggota BPD di Desa Tanjung Beringin rata-rata tidak mengerti dalam merumuskan peraturan desa.
2. Menetapkan Peraturan Desa dapat disimpulkan berada pada kategori baik dimana responden terbanyak yaitu berjumlah 56 orang (40,57%).

3. Membuat peraturan bersama kepala desa terlihat bahwa berada pada kategori kurang baik dimana responden terbanyak memberikan jawaban yaitu berjumlah 57 orang (41,30%).

Dari rekapitulasi jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Berada pada kategori cukup baik dimana jawaban responden sebanyak 150 orang (36,23%) dari keseluruhan responden dalam penelitian ini.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Adapun fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan, maka penulis akan menguraikan analisa dan temuan di lapangan mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan tersebut. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yaitu :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Tidak ada suatu organisasi manapun yang hidup tanpa ada sumber dana. Merupakan suatu kenyataan bahwa dari semua bentuk organisasi baik pemerintah maupun bukan, harus dihadapkan pada keterbatasan dana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua BPD Desa Tanjung Beringin yaitu Bapak Bahtiar, beliau mengatakannya BPD memiliki keterbatasan dana untuk bergerak melaksanakan fungsi legislasi. Dana yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten

Kamper tidak mencukupi . BPD Di Desa Tanjung Beringin tidak memiliki kantor yang representatif dan hanya menumpang pada kantor Kepala Desa.

Selain hal diatas juga saran seperti meja, kursi BPD juga tidak memilikinya, sehingga hal ini juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi legislasinya.

2. Kurangnya Koordinasi Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat

Koordinasi sangat penting dilakukan oleh para anggota BPD , namun pada kenyataannya dilapangan anggota BPD mempertahankan ide dan gagasannya berdasarkan kepentingan masing-masing.

3. Tingkat Pendidikan Anggota BPD Yang Masih Rendah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Pendidikan yang tinggi membuat organisasi akan cepat maju. Hal ini terjadi sebaliknya pada BPD Desa Tanjung Beringin yang mayoritas anggotanya hanya berpendidikan SD dan sebagian tamatan SLTA.

Selain hal diatas juga ada beberapa orang anggota BPD yang tidak tahu mengenai tugasnya sendiri.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Keberadaan dan Pelaksanaan

Fungsi Legislasi BPD

Hal diatas terlihat dengan tidak antusiasnya masyarakat untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan ide-ide serta gagasan dalam rapat yang dilaksanakan oleh BPD. Disamping itu juga masyarakat banyak yang tidak hadir dalam rapat-rapat yang dilaksanakan BPD dengan Pemerintah Desa.

Kemudian masyarakat banyak yang tidak tahu keberadaan serta fungsi BPD itu sendiri. Sehingga hal ini juga menjadi kendala atau pun hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Merumuskan Peraturan Desa

Fungsi legislasi BPD dalam merumuskan peraturan desa kurang berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 58 orang (42,02%) yang menyatakan demikian dengan alasan belum bisa merumuskan peraturan desa.

2. Menetapkan Peraturan Desa

Fungsi BPD menetapkan peraturan desa di Desa Tanjung Beringin sudah berjalan dengan baik , hal ini terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 56 orang (40,57%).

3. Membuat Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Fungsi legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin berada pada kategori kurang baik dimana mayoritas menjawab pada kategori ini yaitu sebanyak 57 orang (41,30%).

Kemudian yang menjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi oleh BPD Desa Tanjung Beringin dapat disimpulkan yaitu :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana
2. Kurangnya koordinasi antar anggota BPD , pemerintah desa dan masyarakat

3. Rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan dan pelaksanaan fungsi legislasi BPD itu sendiri

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran penulis kepada yaitu :

1. Kepada BPD Desa Tanjung Beringin diharapkan kedepannya dapat meningkatkan fungsinya sebagai legislator di tingkat desa bersama Kepala Desa agar cita-cita dan keinginan masyarakat tercapai dengan baik.
2. Kepada Pemerintah Desa Tanjung Beringin agar selalu bekerjasama dengan BPD.
3. Kepada masyarakat diharapkan partisipasinya dalam mensukseskan pelaksanaan fungsi legislasi BPD dan masukan-masukan yang membangun demi kemajuan desa.
4. Kepada pembaca yang budiman diminta kritik dan saran yang membangun demi terciptanya sistem pembelajaran yang efektif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Desa Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa	9
B. Demokratisasi Desa	13
C. Pemberdayaan BPD	15
D. Kedudukan BPD Dan Fungsi BPD Dalam Legislasi Perdes	17
E. Pelaksanaan Fungsi Legislasi	19
F. Teknik Perundang-undangan (<i>Legal Drafting</i>) Perdes	20
G. Variabel Penelitian	32
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	33
B. Populasi Dan Sampel	33
C. Jenis dan Sumber Data	34

D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Sejarah Desa	36
B. Keadaan Geografis	36
C. Kondisi Kependudukan	37
D. Kondisi Pendidikan Penduduk	38
E. Mata Pencaharian Penduduk	40
F. Kehidupan Keagamaan	41
G. Kondisi Pemerintahan Desa	43
H. Struktur Organisasi BPD Desa Tanjung Beringin	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Identitas Responden	47
1. Tingkat Pendidikan	47
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin	
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	49
1. Merumuskan Peraturan Desa	50
2. Menetapkan Peraturan Desa	53
3. Membuat Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	56
C. Hambatan-hambatan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi BPD	
di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu	60
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	63

B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Setia Tunggal. 2001. *Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah*. Jakarta: Harvarindo.
- Koswara, E., 2000. "*Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*". Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Tentang Otonomi Daerah di UNIBRAW Malang, 4 Oktober 1999.
- Modeong, Supardan. 2004. *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta PT Perca.
- Moleong, Lexy j. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Rahman, Maman. 2000. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Ryaas, 2001. "*Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan*". Dalam Jurnal Ilmu Politik No. 17. hal. 3-11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saparin, Sumber. 2000. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharsimi, Ari Kunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. J Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulastomo. 2001. *Demokrasi atau Democracy*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Syarifin, Pipin. dan Jubaedah, Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. : Bandung: Pustaka Setia..
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Djohan, *Djohermansyah*. 2005. "Fenomena etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah". Dalam Haris, syamsuddin (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI anggota IKAPI. Hal. 291).

PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Absensi Rapat Aparat Desa Tanjung Beringin	3
Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel	34
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Tanjung Beringin Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel IV.2 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Beringin	39
Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Beringin	40
Tabel IV.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata pencaharian di Desa Tanjung Beringin	41
Tabel IV.5 : Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Beringin	43
Tabel IV.6 : Jumlah RT,RW dan Dusun di Desa Tanjung Beringin	44
Tabel IV.7 : Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Beringin.....	45
Tabel V.1 : Tingkat Pendidikan Responden dari BPD	48
Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden dari Masyarakat	48
Tabel V.3 : Tanggapan Responden Tentang Bisa Merumuskan Peraturan desa	50
Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Merumuskan Peraturan Desa	51
Tabel V.5 : Tanggapan Rseponden Mengenai Memperhatikan Aspirasi Masyarakat Dalam Merumuskan Peraturan Desa	52
Tabel V.6 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Merumuskan Peraturan Desa	53
Tabel V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Cara Menetapkan Peraturan Desa	54
Tabel V.8 : Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan BPD Dalam Rapat Menetapkan Peraturan Desa.....	54

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Mengenai Pernah Menetapkan Peraturan Desa	55
Tabel V.10 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Menetapkan Peraturan Desa	55
Tabel V.11 : Tanggapan Responden Mengenai BPD Sudah Membuat Peraturan Desa	56
Tabel V.12 : Jawaban Responden Mengenai Cara Pembuatan Peraturan desa	57
Tabel V.13 : Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan BPD Dalam Rapat Pembuatan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	57
Tabel V.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Membuat Peraturan Desa	58
Tabel V.15 : Rekapitulasi Seluruh Jawaban Responden Mengenai Fungsi Legislasi BPD di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Organisasi BPD Desa Tanjung Beringin Kecamatan

Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar 46